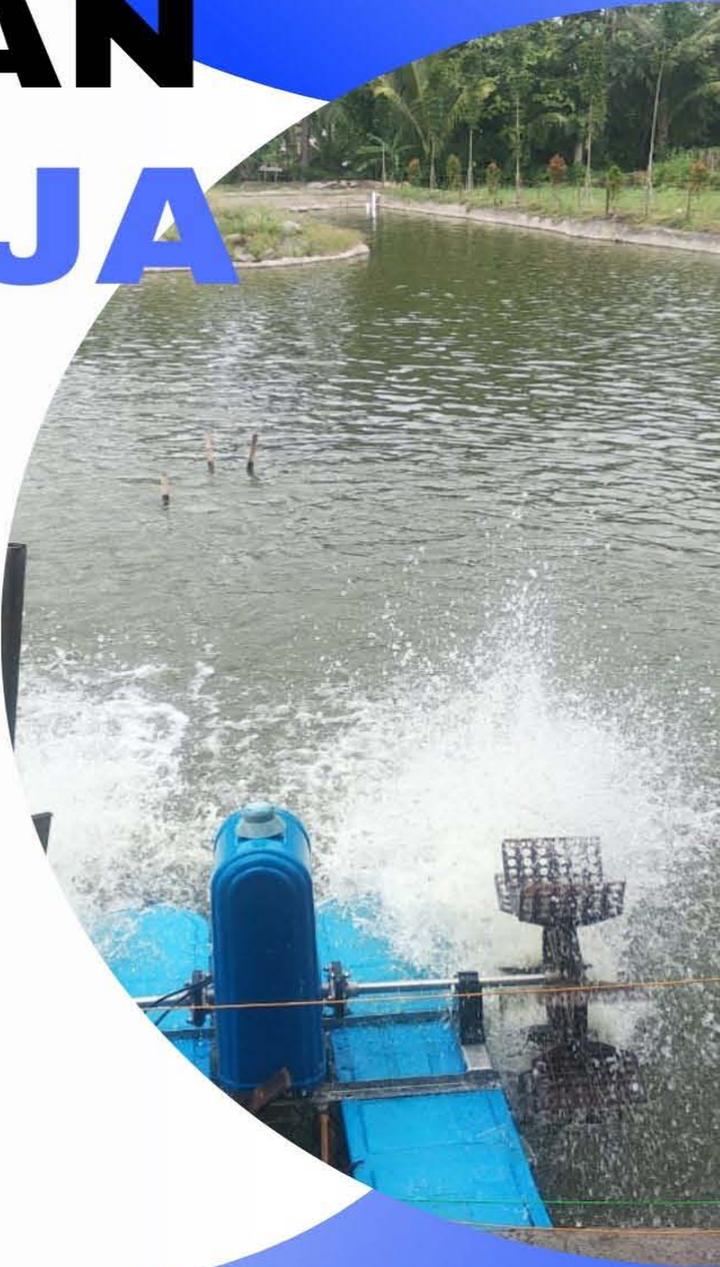

LAPORAN

KINERJA

TRIWULAN I

TAHUN 2023



BADAN PENGEMBANGAN SDM KP
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KP
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Pelatihan (Puslatluh KP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Puslatluh KP tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Puslatluh KP tahun 2020-2024, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Puslatluh KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Tahun 2023, Puslatluh KP telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun 2023, keberhasilan/kegagalan program,

permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Puslatluh KP.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pada bidang pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya selama tahun 2023.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Puslatluh KP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Puslatluh KP, dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 17 April 2023

**Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
KP,**



Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya optimal menjalankan visi dan misi Presiden Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong.

Kementerian Kelautan dan Perikanan siap melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

1. membangun sumber daya manusia (SDM);
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. menghapus kendala regulasi;
4. menyederhanakan birokrasi, dan;
5. melakukan transformasi ekonomi.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mempunyai target awal Tahun 2023 untuk pelatihan sebanyak 31.490 orang masyarakat yang dilatih, pelatihan aparatur 4.770 orang,

sarana pelatihan dan penyuluhan KP 6 unit, prasarana pelatihan dan penyuluhan KP 4 unit dan 47.000 Kelompok pelaku utama yang disuluh.

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Triwulan I adalah 115,91% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Capaian Penetapan Kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan tersedianya lulusan pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar kompetensi dan kebutuhan, sampai triwulan I tahun 2023 dengan target prioritas yang telah dicapai sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN			
		Target	Target Tw 1	Capaian	%
1. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan					
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) (Tahunan)	70		-	
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	31.490	4.560	5.667	124,28
3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768	1,04	1,38	132,31
2. Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1800	147	244	165,99
3. Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP					
5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang) (Tahunan)	137		-	
6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket) (Tahunan)	10		-	
4. Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP					
7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	6		-	
8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7		-	
5. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000	7.612	8.855	116,33
10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800	-	15	
11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.000	584	671	114,90
12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang) (Tahunan)	12.342		-	
6. Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP					
13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan lptek (Desa) (Tahunan)	6			
14	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (produk) (Tahunan)	22			
7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN			
		Target	Target Tw 1	Capaian	%
15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) (Tahunan)	6			
16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) (Tahunan)	4			
8. Aparatur Yang Dididik dan Dilatih					
17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.770	1.770	2.415	136,44
9. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Buah)	10	2	2	100,00
19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	25	27,96	111,84
20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1			
21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1			
22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92			
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP (%)	92	100	109	108,70
24	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)	77			
25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2021 (%)	≤0,5			
26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)	75	75,00	100	133,33
27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Inovasi)	1			
28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP	80			

Penyerapan Anggaran Lingkup Puslatluh KP Sampai dengan tahun 2023, Puslatluh KP melaksanakan DIPA TA. 2023 dengan total anggaran Lingkup Puslatluh KP sebesar Rp.656.527.976.000,- dan Pagu Puslatluh KP sebesar Rp. 14.971.385.000,-. Adapun Realisasi sampai dengan 31 Maret 2023 tahun anggaran 2023 adalah realisasi anggaran pada DIPA Lingkup Puslatluh KP Rp. 123.021.612.542,- (18,74%) dan Realisasi Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 2.698.186.964 (18,02 %).

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran triwulan I tahun 2023 capaian kinerja output program belum semuanya tercapai namun demikian untuk menghasilkan kualitas hasil kinerja yang optimal dimasa-masa mendatang dalam penyelenggaraan program perlu melakukan berbagai hal analisa sebagai berikut:

1. Mensinergikan target pelaku usaha dan kelompok pelaku utama yang disuluh serta dilatih dalam rangka efektifitas dan percepatan capaian kegiatan.
2. Mendorong keterikatan stakeholders secara maksimal dalam melaksanakan komitmen kerjasamanya yang telah dirintis dalam rangka pengembangan Riset dan SDM KP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Tujuan	2
	3. Tugas dan Fungsi	3
	4. Keragaan SDM	4
	5. Sistematika Pelaporan	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
	1. Rencana Strategis 2020-2024	11
	a. Visi	
	b. Misi	
	c. Tujuan	
	d. Sasaran Strategis	
	e. Potensi dan Permasalahan	
	2. Perjanjian Kinerja	17
	3. Rencana Kerja Tahunan	19
	4. Pengukuran Kinerja	20
	a. Rumus Pengukuran	
	b. Metode Pengukuran	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	1. Prestasi Kinerja	22
	2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
	3. Akuntabilitas Keuangan	60

BAB IV	PENUTUP	65
	1. Capaian Kinerja Utama	65
	2. Rekomendasi dan Permasalahan	68

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada tahun 2023 ini melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BRSDM KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan

dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program riset dan SDM KP, sebagaimana tertuang dalam Renstra BRSDM KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai Puslatluh KP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Puslatluh KP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP kepada Kepala BRSDM KP selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP pada Tahun 2023.

- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala BRSDM KP selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP;
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Puslatluh KP.

3. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri KP OTK Permen KP No.48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- 2) Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

- 3) Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

c. Susunan Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PUSLATLUH KP



4. Keragaan SDM

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP merupakan salah satu unit kerja dari Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM KP yang mampu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, dengan misi:

- (1) Mengembangkan kelembagaan pelatihan dan penyuluhan, dan
- (2) Mengembangkan SDM kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Puslatluh KP dibantu oleh 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan, yaitu Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan-Sumatera Utara, BPPP Tegal-Jawa Tengah, BPPP Banyuwangi-Jawa Timur, BPPP Bitung-Sulawesi Utara, dan BPPP Ambon-Maluku.

Kebijakan Kepala Puslatluh KP berkaitan dengan strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan penyuluhan adalah:

- 1) Untuk pelatihan bagi Aparatur, mengutamakan diklat mandatory, yaitu diklat prajabatan dan diklat bagi calon tenaga fungsional;
- 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai KKP untuk mendapatkan diklat;
- 3) Mendorong adanya pengembangan jenis dan metode pelatihan dan penyuluhan;
- 4) Mengupayakan perencanaan pelatihan dan penyuluhan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penyuluhan;
- 5) Membuat kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring;
- 6) Mendorong pencapaian sasaran dengan memanfaatkan anggaran diluar Puslatluh KP melalui kerjasama program pelatihan dan penyuluhan;
- 7) Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana standar pelatihan secara bertahap;
- 8) Memberikan informasi pelatihan dan penyuluhan secara cepat, terkini dan akurat kepada stakeholders;
- 9) Mendorong tersedianya kurikulum dan media belajar bagi pelatihan

- teknis dan fungsional;
- 10) Mendorong tersedianya program penyuluhan, dan materi penyuluhan dalam pendampingan kepada pelaku utama/usaha perikanan;
 - 11) Memacu standarisasi pelatih, tenaga pengelola pelatihan, dan Penyuluh Perikanan;
 - 12) Memberikan kesempatan bagi setiap pelatih, tenaga pengelola pelatihan, dan Penyuluh Perikanan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka mengisi, membina dan mengembangkan kompetensi jabatan atau kompetensi kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan didukung oleh SDM yang profesional dibidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, mesin perikanan dan manajemen. Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga kepelatihan terus dilakukan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik. Jumlah SDM Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan secara keseluruhan dapat dilihat pada infografis berikut:

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan UPT Pelatihan memiliki wilayah pelatihan yang secara keseluruhan dapat melayani pelatihan di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP

No.	Satuan Kerja	Wilayah Pelatihan (Provinsi)	Keterangan
1.	BPPP Medan	Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung	8 Provinsi, 110 Kabupaten/Kota
2.	BPPP Tegal	Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalteng	9 Provinsi, 115 Kabupaten/Kota
3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalsel	5 Provinsi, 64 Kabupaten/Kota
4.	BPPP Bitung	Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Kaltim Kalut	7 Provinsi, 79 Kabupaten/Kota
5.	BPPP Ambon	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sultra	5 Provinsi, 57 Kabupaten/Kota
6.	BDA Sukamandi	Seluruh Indonesia	34 Provinsi

Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tertentu, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan dapat mendatangkan Pelatih dari luar instansi guna memberikan mata pelatihan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kondisi aktual di lapangan.

Sedangkan Untuk Keragaan data jumlah Penyuluh Perikanan sebagai pendamping program prioritas KKP Tahun 2023 adalah sebanyak 4.425 orang, terdiri dari: 1). Penyuluh PNS sebanyak 2.295 orang, 2). Penyuluh CPNS sebanyak 199 orang, 3) PPB sebanyak 1.584 orang,) PPPK sebanyak 347 orang. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluhan memiliki wilayah yang secara keseluruhan dapat di seluruh Indonesia.

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan di bidang KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluhan memiliki wilayah yang secara keseluruhan dapat di seluruh Indonesia.

Satminkal dan Wilayah Kerja Penyuluhan Perikanan Per. Provinsi

No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)	No.	Satminkal	Wilayah Kerja (Provinsi)
1.	BPPP Medan	Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau	6.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum Palembang	Bangka Belitung Jambi Bengkulu Sumsel Lampung
2.	BPPP Tegal	Jawa Tengah DI Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Timur	7.	Balai Riset Perikanan Air Tawar Bogor	Banten DKI Jakarta Jawa Barat
3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur Kalimantan Selatan	8.	Balai Riset Perikanan Air Payau Maros	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat
4.	BPPP Bitung	Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo			
5.	BPPP Ambon	Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat	9.	Balai Besar Riset Perikanan Budiaya Perikanan Air Laut Gondol, Bali	Bali NTB NTT Kalimantan Tengah

PROFIL SATKER LINGKUP PUSLATLUH



5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala sampai dengan tahun 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan SDM di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja Tahun 2023, serta metode Pengukuran Kinerja.

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan menyangkut dengan persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Nasional adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa Aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

2. Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden

Kementerian Kelautan dan Perikanan siap mendukung dan melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia (SDM);
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Menghapus kendala regulasi;
4. Menyederhanakan birokrasi, dan;
5. Melakukan transformasi ekonomi.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada:

1. Peningkatan SDM,
2. Pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP),
3. Peningkatan pengawasan SDKP;
4. Industrialisasi kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan usaha dan investasi;
6. Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual, dan
7. Komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.

Kebijakan Pembangunan KKP merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Nasional dalam rangka mencapai sasaran strategi pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024. Dengan demikian Kebijakan Puslatluh KP adalah:

- 1) Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;

- 2) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
- 4) Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi teknologi dan pelatihan.

3. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

4. Sasaran Strategis

Secara rinci Puslatluh KP memiliki 8 (delapan) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut ditetapkan melalui tahapan-tahapan program berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

1) STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

- Pendampingan Kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

2) CUSTOMERS PERSPECTIVE

- Pelatihan dan penyuluhan mendukung hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan

3) INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat

4) LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

- Tata kelola pemerintahan yang baik
- Terwujudnya birokrasi Puslatluh KP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

5. Potensi dan Permasalahan

Masalah dan tantangan tentunya dihadapi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam kiprahnya dalam mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan.

Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam khususnya di bidang pelatihan diantaranya:

A. Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:

- a) Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai Pelatihan dan P2MKP yang masih kurang dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
- b) Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di P2MKP, mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;
- c) Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP
- d) Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
- e) Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
- f) Masih rendahnya jumlah masyarakat KP yang kompeten dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP di setiap wilayahnya;
- g) Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;
- h) Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dibidang kelautan dan perikanan
- i) Standarisasi kompetensi masih terbatas jumlahnya;
- j) Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;

- k) Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatkan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- B. Aspek Pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan dan penyuluhan perikanan diantaranya:
- a) Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;
 - b) Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;
 - c) Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;
 - d) Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer.
- C. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah; Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasikan.
- D. Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan, juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup krusial diantaranya:
- Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang memerlukan pembinaan dan pendampingan;
 - Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya;
 - Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;

- Penyebaran jumlah penyuluh perikanan relatif tidak merata di semua kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan;

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2023 diatas, Puslatluh KP menetapkan target IKU untuk masing-masing sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berbasis Balance Score Card (BSC). Target tersebut ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja utama untuk tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Perjanjian Kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 seperti pada Tabel di bawah.

PK Awal Puslatluh KP Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan KP				
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	31.940
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,597
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1800
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.000
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek (Desa)	6
		14	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (produk)	9
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	6
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	4
Kegiatan 2. pelatihan Aparatur KP				
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.770
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM				
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	75
27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi	1		

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
			Pelayanan Publik	
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

7. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023

Adapun kegiatan prioritas Puslatluh KP termasuk UPT Pelatihan KP dan Satminkal Penyuluhan KP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kinerja utama yaitu:

1. Pelatihan Masyarakat.

Pelatihan masyarakat akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 31.940 orang, yang difokuskan kepada pelatihan-pelatihan dengan metode blended/campuran dan pelatihan full online/open akses akibat adanya PPKM di masa pandemi Covid 19. Pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Diklat, yaitu: BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Aertembaga, dan BPPP Ambon.

2. Pelatihan Aparatur.

Pelatihan aparatur bagi 4.770 orang adalah sebagai upaya KKP untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur KP, dilakukan melalui penyelenggaraan diklat struktural, teknis, fungsional, dan prajabatan yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi dengan metode online/daring/blended menggunakan aplikasi e-milea.

3. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang disuluh

Penyuluhan diberikan kepada 47.000 Kelompok pelaku utama/usaha perikanan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan PNS maupun Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), dengan pengendalian kinerja dilaksanakan oleh 9 (Sembilan) Satminkal Penyuluh Perikanan, dengan target kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan kelas kelompok

pelaku utama/usaha, dan pembentukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi Sektor KP.

8. Pengukuran Kinerja

A. Rumus Pengukuran Kinerja

Kinerja penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan KP sebagai usaha penciptaan SDMKP yang memiliki kompetensi untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan masih memerlukan perbaikan. Perbaikan tersebut antara lain adalah belum terukurnya kinerja pelatihan dan penyuluhan KP. Penyelenggaraan pelatihan KP tidak jarang penyelenggara pelatihan, baik Puslatluh KP dan UPT Pelatihan, maupun P2MKP merasa kecewa karena dinilai tidak memiliki kinerja yang standar. Mereka menganggap telah terjadi manipulasi data oleh penilai. Bisa saja itu terjadi kalau penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan dilakukan dengan ukuran subyektif. Dengan kata lain terjadi peluang munculnya bias. Di sini, bias merupakan distorsi pengukuran yang tidak akurat. Meskipun pelatihan bagaimana melakukan penilaian kerja dapat mengurangi bias, maka bias sering terjadi ketika penilaian tetap tidak lepas dari unsur emosional para penilai.

Pengukuran kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan

yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

B. Metode Pengukuran kinerja

Balanced Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. *Balanced Scorecard* dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. *Balance Scorecard* berasal dari dua suku kata, *Balanced* yang artinya berimbang dan *scorecard* yang artinya kartu skor.

Lebih jauh lagi *Balanced Scorecard* memiliki fungsi sebagai berikut :

- *Sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang ditetapkan telah tercapai.*
- *Sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda.*
- *Sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda.*
- *Alat analisis efektifitas strategi yang telah digunakan.*
- *Memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki.*
 - *Sebagai alat dalam menentukan key performance indicator dalam organisasi.*

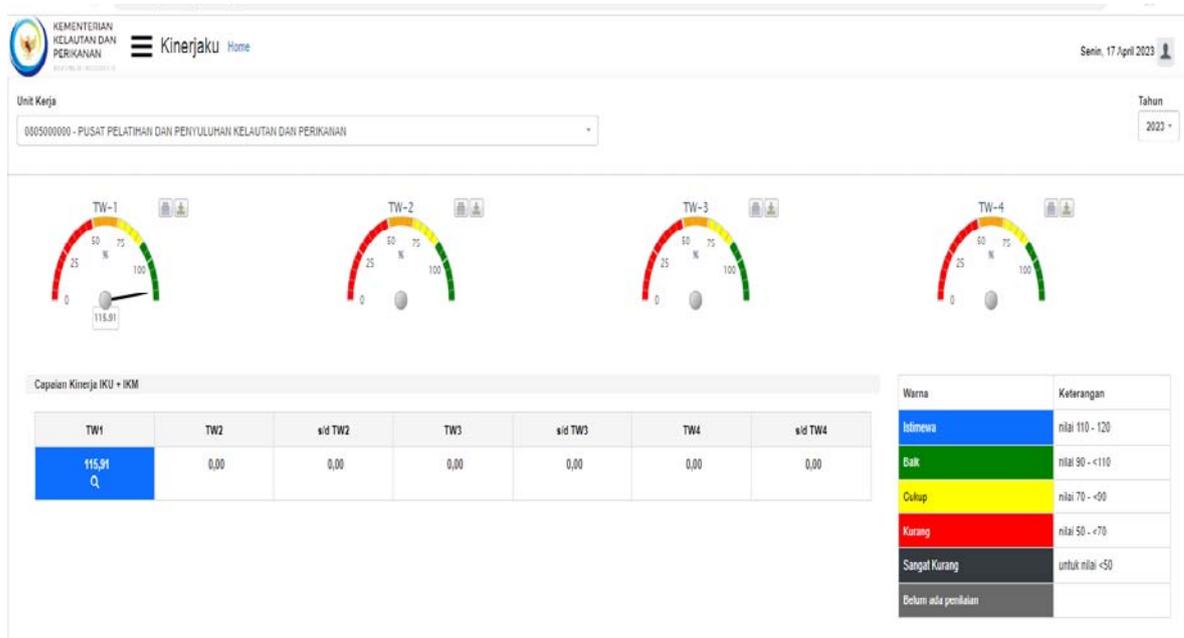
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Prestasi Kinerja

A. Nilai Kinerja “BAIK”

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjajaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Triwulan I adalah **115,91%** seperti pada tampilan grafik *dashboard* dibawah ini :

Gambar 1. Grafik Nilai Kinerja Puslatluh dan UPT



B. Keberhasilan Tahun 2023

Capaian keberhasilan khususnya untuk tahun 2023 adalah capaiannya dalam beberapa IKU Utama sudah melebihi target yang ditetapkan.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi nasional. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis Puslatluh KP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Pendekatan Analisis Capaian Kinerja Organisasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 menetapkan tinjauan-tinjauan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Capaian Kinerja tahun 2023 pada Puslatluh KP sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN			
		Target	Target Tw 1	Capaian	%
1. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan					
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) (Tahunan)	70		-	
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	31.490	4.560	5.667	124,28
3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768	1,04	1,38	132,31
2. Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1800	147	244	165,99
3. Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP					
5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang) (Tahunan)	137		-	
6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket) (Tahunan)	10		-	
4. Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP					
7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	6		-	
8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7		-	
5. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN			
		Target	Target Tw 1	Capaian	%
9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000	7.612	8.855	116,33
10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800	-	15	
11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.000	584	671	114,90
12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang) (Tahunan)	12.342		-	
6. Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP					
13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek (Desa) (Tahunan)	6			
14	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (produk) (Tahunan)	22			
7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) (Tahunan)	6			
16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) (Tahunan)	4			
8. Aparatur Yang Dididik dan Dilatih					
17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.770	1.770	2.415	136,44
9. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Buah)	10	2	2	100,00
19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	25	27,96	111,84
20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1			
21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1			
22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92			
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP (%)	92	100	109	108,70
24	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)	77			

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN			
		Target	Target Tw 1	Capaian	%
25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2021 (%)	≤0,5			
26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)	75	75,00	100	133,33
27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Inovasi)	1			
28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP	80			

Sasaran Program SK.01 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.01.01

Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pada indikator kinerja ini target jumlah lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri KP pada tahun 2023 sebesar 70 % dan 31.490 orang yang dilatih lulusan pelatihan yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri KP. Pada Triwulan I tahun 2023 IKU ini belum ada capaiannya, sama dengan capaian pada triwulan I tahun 2022 sehingga belum dapat diukur keberhasilannya. Hal ini Disebabkan IKU ini adalah outcome dampak pelatihan maka proses Purnawidya pelatihan diterima di Du/di minimal 3 bulan dari kegiatan pelatihannya disebabkan adanya uji kompetensi dan kemandirian usaha.

Perbandingan IKU ini dengan Tahun 2022 untuk data capainnya masih belum bisa dinilai capaiannya.

Sasaran Program SK.01 Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.01.02 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih

IKU terkait Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan kelautan dan perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), yakni BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon.

IKU Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria yaitu :

- 1) Pelatihan berbasis APBN;
- 2) Peserta merupakan masyarakat (non ASN);
- 3) Penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan model Blended (kombinasi online dan tatap muka).

Selama Tahun 2017-2023 Jumlah Lulusan Pelatihan masyarakat yang telah dilatih sebanyak 86.110 orang, sebagaimana output setiap tahunnya berbeda beda berikut juga satuan anggaran pelatihannya.

Perbandingan dengan capaian tahun 2022 dengan Tahun 2023 adalah sebesar 142,32%, dengan Realisasi jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP pada triwulan I tahun 2021 ini adalah sebesar 3.982 orang sedangkan tahun 2023 sebesar 5.667 orang.

Peningkatan kompetensi masyarakat KP ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan teknis maupun manajerial di bidang kelautan dan perikanan, seperti penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, permesinan perikanan, budidaya ikan, dan pengolahan garam. Selain itu kegiatan

pelatihan regular teknis seperti BST dan sertifikasi Ankapin/Atkapin juga tetap dilaksanakan dan menjadi kegiatan pelatihan yang juga dapat menghasilkan PNBP untuk masing-masing Balai pelaksanaannya. Beberapa jenis pelatihan yang diadakan oleh Balai tergolong sebagai pelatihan Aspirasi yang merupakan kerjasama antara KKP dengan anggota DPR/DPD asal wilayah/ daerah tertentu. Pelatihan ini secara khusus memberikan dukungan kegiatan pelatihan KP terhadap masyarakat di daerah pemilihan dari anggota DPR/DPD tersebut.

Sasaran Program SK.01 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.01.02

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. IKU ini adalah IKU Baru pada tahun 2023, adapun capaian pada IKU ini sebesar Rp. 9.768.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 1,380.000.000,-.

Sasaran Program SK.02 Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.02.01 Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi

Sebagai upaya pengakuan dan perlindungan atas kompetensi yang dimiliki oleh SDM KP, khususnya tenaga kerja sektor KP, maka Puslatluh KP melalui Balai Diklat pada tahun 2023 telah menetapkan target untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi SDM KP sebanyak 1.800 orang, Indikator kinerja utama untuk Sasaran Strategis ini adalah jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 180 orang, yang dihasilkan oleh 5 (lima) BPPP.

IKU dari sasaran strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah meningkatnya kompetensi SDM KP yang dihasilkan dari proses pelatihan dan penyuluhan KP adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

BRSDM sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP, sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab atas pencapaian IKU tersebut, dengan indikator yang hendak dicapai adalah jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diberi kewenangan melaksanakan Uji Kompetensi dibawah dan dibentuk oleh BNSP dan lembaga diklat yang merupakan approved untuk melakukan diklat kepelautan internasional dengan mengacu pada standar SKKNI, SK3, dan IMO Course.

Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP melalui kegiatan sertifikat kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas

kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sesuai tugas/jabatan yang dimiliki sesuai standar kompetensi yang berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap

kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sertifikasi kompetensi ini juga memberikan manfaat kepada perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan remunerasi sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki. Pada Triwulan I tahun 2023 ini realisasi sebesar 244 orang sedangkan pada tahun 2022 triwulan I belum ada capaiannya.

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang diuji kompetensinya. Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari SDM KP yang mengikuti sertifikasi kompetensi baik purnawidya pelatihan maupun dari dunia usaha, dan dunia industri.

Sehingga selama periode tahun 2017 sampai dengan triwulan tahun 2023 ini, secara kumulatif Puslatluh KP telah mampu merealisasikan target kinerja sebesar 19.424 orang yang mengikuti uji kompetensi untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan.

Penyebab kegagalan pencapaian IKU ini antara lain adalah:

1. Belum adanya Identifikasi Kebutuhan Masyarakat yang akan disertifikasi kompetensinya;
2. Belum adanya materi uji kompetensi yang akan disiapkan.
3. Belum adanya kerjasama dengan Perusahaan peserta uji kompetensi.

Sasaran Program SK.03 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan

Indikator Kinerja IKS.03.01

Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)

Pada indikator kinerja ini Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)(orang) target jumlah lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) pada tahun 2023 sebesar 137 orang. Dan untuk capaian pada IKU ini belum dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. Disebabkan IKU ini adalah outcome dampak pelatihan maka proses Purnawidya pelatihan menjadi Start UP minimal 6 bulan dari kegiatan pelatihannya. Perbandingan IKU ini dengan Tahun 2022 untuk data capainnya masih belum bisa dinilai capaiannya.

Sasaran Program SK.03 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan

Indikator Kinerja IKS.03.02

Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya

Salah satu Penyelenggaraan fungsi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan upaya menjadikan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur sektor kelautan dan perikanan dapat berperan nyata dalam pembangunan nasional.

Untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pelatihan, salah satu strategi yang ditempuh adalah secara terus menerus meningkatkan profesionalisme para pelatih.

Kebijakan penyelenggaraan pelatihan kp yang ditetapkan adalah diterapkannya kurikulum berdasarkan kompetensi kerja dimana pelaksanaan proses berlatih dan melatih dengan menggunakan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GGBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu hasil

pelatihan yang ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta sikap para peserta yang lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah tersedianya pelatih yang profesional, yakni pelatih yang menguasai dan mampu melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna.

Untuk meningkatkan serta mendorong tumbuhnya sikap lebih percaya diri para pelatih dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, maka setiap pelatih di Lembaga Pelatihan perlu melaksanakan kajiwidya sesuai dengan materi yang dilatihkan.

Kajiwidya adalah kegiatan pelatih untuk belajar atau berlatih sendiri, melakukan, mengamati dan menganalisis suatu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja pelatih sesuai dengan substansi mata diklat. Pelatih lembaga pelatihan terdiri dari widyaiswara, instruktur, dan widyaiswara/instruktur luar biasa. IKU ini terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan bisa dibandingkan dengan IKU Tahun sebelumnya, untuk capaiannya baru bisa dilihat pada Triwulan IV Tahun 2023 begitu juga pada capaian tahun sebelumnya.

Sasaran Program SK.04 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKS.04.01

Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)

Dalam rangka meningkatkan tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang profesional agar mampu bersaing dipasar global perlu adanya petunjuk/pedoman untuk para penyelenggara pelatihan yaitu antara lain adanya Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagai acuan

dalam pelaksanaan pelatihan kerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Untuk mewujudkan pelatihan kerja tersebut, dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelatihan yang mengacu kepada kompetensi kerja selanjutnya dikenal sebagai Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training/CBT) yang baru dikembangkan di Indonesia. Beberapa keuntungan pelatihan berbasis kompetensi diantaranya adalah pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, praktis, ada kepastian pengakuan bagi peserta pelatihan dari dunia usaha sebagai pengguna jasa. pelatihan berbasis kompetensi ini berorientasi dengan dunia kerja, dimana program dan materinya merupakan turunan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pihak terkait dan disyahkan melalui Keputusan Menakertrans, dengan demikian maka diharapkan lulusan (output) pelatihan ini dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Bagi peserta pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan akan memperoleh pengakuan apabila peserta dinyatakan lulus melalui uji kompetensi yang diselenggarakan setelah tahapan proses pelatihan dapat diselesaikan oleh peserta pelatihan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memenuhi akan kebutuhan informasi dan pedoman yang diperlukan oleh lembaga penyelenggara pelatihan, maka perlu disusun Norma, Standar, Pedoman dan Kurikulum Pelatihan dan Penyuluhan.

IKU Ini telah ada di tetapkan pada PK Tahun 2022 sehingga bisa dibandingkan dengan IKU Tahun sebelumnya dan untuk capaiannya baru bisa dilihat pada Triwulan III Tahun 2023.

Sasaran Program SK.04

Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKS.04.02

Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang terstandar di bawah BRSDM yang masih berlangsung. Lembaga pelatihan dan penyuluhan seperti akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan.

Lembaga pelatihan yang terstandar merupakan langkah strategis dalam rangka menjamin mutu dan meningkatkan layanan pelatihan dan penyuluhan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan standardisasi seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, meliputi standardisasi: program, lulusan, evaluasi, biaya, proses, ketenagaan, serta standardisasi sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP.

IKU ini menggambarkan mengenai standardisasi sistem manajemen mutu lembaga pelatihan, dimana 6 (enam) lembaga pelatihan di bawah koordinasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan SDM KP. Dengan sistem manajemen mutu (QMS) yang efektif ini, maka Balai memiliki akan struktur yang lebih jelas, pendekatan sistematis untuk meningkatkan layanan kepada setiap peserta latih, serta membantu untuk pengendalian dan proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan akreditasi QMS ini juga akan memberikan manfaat kepada Balai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi tingkat kesalahan yang mengarah pada peningkatan produktivitas Balai.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan KP sejak tahun 2017 telah terakreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Dimana terdapat 7 karakteristik utama yaitu; pendekatan pro aktif, integrasi mutu ke dalam proses bisnis, performance, mengikuti siklus PDCA, penyesuaian lingkup dengan komitmen organisasi, bersifat sukarela, dan relevan dengan tugas dan fungsi Balai. Dengan akreditasi ini telah memberikan manfaat nyata kepada balai dalam peningkatan kepuasan layanan kepada peserta latih, seperti pembuatan Pelayanan Pelatihan Terpadu satu Pintu (PTSP) di beberapa balai, pengurangan biaya pelatihan tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan pelatihan dan mutu lulusan pelatihan, serta mampu mengurangi permasalahan atau sengketa antara bagian dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2023 ini, telah dilakukan audit internal atas akreditasi ISO 9001:2015 yang diperoleh 6 lembaga, yakni Puslatluh KP BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, dan BPPP Ambon, serta BDA Sukamandi pada tahun 2022. Audit adalah audit pemantauan yang wajib dilakukan oleh badan sertifikasi independen setiap 1 tahun sekali terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO, yang bertujuan untuk menentukan apakah 6 lembaga tersebut masih berhak menyandang sertifikat ISO 9001:2015 atau tidak.

Capaian IKU ini pada triwulan I ini belum ada disebabkan masih proses penilaian intern oleh Tim ISO 9001/2015, , Diharapkan dengan hasil audit yang menyatakan bahwa organisasi masih sesuai dengan persyaratan sistem manajemen, organisasi masih mengimplementasikan kebijakan dan SOP seperti yang sudah ditetapkan, dan secara berkala melalui auditor internal telah melakukan peninjauan dan peningkatan manajemen mutu melalui audit internal dan tinjauan manajemen, serta tindakan perbaikan yang berkelanjutan sesuai sistem manajemen dan monitoring sasaran mutu.

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.05.01

Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)

IKU jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dinilai kelas kelompoknya merupakan IKU yang menunjukkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sasaran Strategis dari IKU ini adalah meningkatnya nilai ekonomi KP mendukung terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan fokus pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, dimana Puslatluh KP memiliki peran strategis dalam peningkatan nilai ekonomi KP melalui peningkatan kelas kelompok utama/pelaku usaha perikanan.

Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan melalui pendekatan kelompok sehingga kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan mampu tumbuh dan berkembang lebih baik. Orientasi dari proses tersebut diharapkan mampu menumbuhkembangkan dan meingkatkan kelas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: 1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi

kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350. 2. Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650. 3. Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000.

IKU jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan yang kompeten dan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 1.800 orang untuk Tahun 2023, dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 sebesar 15 kelompok dan perbandingan dari triwulan I tahun 2022 sebelumnya sebesar 4 kelompok.

Penyebab kegagalan IKU ini dikarenakan:

1. Proses penilaian kelas kelompok mulai dari SK Kepala Dinas, Proses Penilaian ke Kelompok, Rapat Penilaian, Sampai Sertifikat Kelompok diterbitkan oleh Camat, membutuhkan proses waktu yang lama disebabkan melibatkan banyak pihak.
2. SK Penetapannya belum keluar disebabkan masih adanya verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah.
3. Penggantian PPB di kabupaten kota sehingga Penyuluh Perikanan Bantu masih dalam proses pengenalan kelompok .

**Sasaran Program SK.05
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

**Indikator Kinerja IKS.05.02
Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh**

IKU jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dinilai kelas kelompoknya merupakan IKU yang menunjukkan jumlah

anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

IKU jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan yang kompeten dan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 47.000 orang, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. IKU jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dinilai kelas kelompoknya merupakan IKU yang menunjukkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya sesuai dengan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang dinilai kelas kelompoknya yang termuat didalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

IKU jumlah pelaku utama/usaha lulusan pelatihan yang kompeten dan jumlah anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah targetnya sebanyak 47.000 orang berbeda dengan tahun 2022 yang sebesar 45.000 kelompok. Adapun capaian tahun 2023 pada triwulan I sebesar 8.855 kelompok.

Penyebab keberhasilan IKU ini adalah :

- 1) Adanya SKP bagi setiap Penyuluh sehingga wajib menyuluh ke kelompok binaannya
- 2) Adanya Sanksi bagi Penyuluh yang tidak tercapaian nilai SKP nya

- 3) Pelaksanaan Penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan pada awal tahun, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM calon maupun penerima program bantuan KKP dan untuk mendukung program-program prioritas KKP lainnya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah tersedianya database penyelenggaraan penyuluhan melalui SIMLUH KP dari aplikasi sistem pelaporan online penyuluh perikanan yang dilaporkan oleh penyuluh dalam melaporkan capaian kinerja dalam pendampingan kelompok.

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.05.03 kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)

IKU terkait Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Sasaran Strategis dari IKU ini adalah mempersiapkan calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan.

IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk diukur dengan menghitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk / ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan di periode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja

penyuluh perikanan. Capaian pada tahun 2023 sebesar 671 kelompok dari target sebesar 3.000 kelompok.

Penyebab kegagalan IKU ini dikarenakan:

- 1) Bulan Januari-Februari 2023 masih dalam proses Penyusunan materi materi penyuluhan kp, identifikasi calon kelompok sehingga proses penilaiannya membutuhkan banyak Pihak terkait
- 2) Penggantian PPB di kabupaten kota sehingga Penyuluh Perikanan Bantu masih dalam proses pengenalan kelompok .

Sasaran Program SK.05 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.05.04

Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

IKU ini adalah IKU Baru pada tahun 2023, adapun capaian pada IKU ini sesuai manual IKU nya diambil dari data Jumlah PPB, Jumlah PPS, Jumlah Pengelola UMKM, dan Jumlah P2MKP dengan target sebesar 12.342 orang, dan metode pengukurannya Tahunan.

Penyebab keberhasilan IKU ini dikarenakan: SK PPB dan PPS sudah di terbitkan oleh BRSDMKP yaitu PPB sebanyak 1.661 orang, 3) Penyuluh Swadaya 1.860 orang tahun 2023.

Penyebab Kegagalan IKU ini dikarenakan:

- a) Jumlah Penyuluh Perikanan Bantu berkurang setiap waktu disebabkan ada yang diangkat menjadi PNS, Mutasi jabatan serta berhenti menjadi PPB.
- b) Belum dilakukan Pemetaan Jumlah Pengelola UMKM

Sasaran Program SK.06 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKS.06.01 Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek (Paket)

Penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Faktanya sampai saat ini khususnya kegiatan hilirisasi teknologi kepada pengguna masih belum optimal. Untuk itu, dibutuhkan kegiatan hilirisasi Iptek untuk mengubah perilaku serta pemanfaatan inovasi teknologi oleh masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk. Ditambah lagi hasil riset yang dihasilkan harus bisa disampaikan dan diterapkan oleh masyarakat. Beberapa jenis kegiatan riset yang dilakukan, mulai dari kegiatan yang bersifat responsif, antisipatif, hingga yang bersifat rekomendasi. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan hasil riset perlu suatu kegiatan diseminasi yang dapat secara luas berpengaruh terhadap usaha-usaha peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja BRSDMKP memberikan solusi untuk menerobos tantangan tersebut dengan mengkolaborasikan kegiatan riset dan SDM melalui program Desa Inovasi. Program ini mendorong pemangku kepentingan desa untuk membangun budaya inovasi berbasis kelautan dan perikanan dalam mengelola sumberdaya untuk kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi bersandar sebatas eksploitasi sumberdaya, tapi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya berbasis iptek. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan program, hasil karya para peneliti BRSDMKP akan diramu oleh instruktur, widyaiswara, penyuluh, dosen, dan stakeholder terkait agar dapat mudah diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat. Di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan hilirisasi paket teknologi dalam rangka mengintroduksi paket teknologi kelautan dan perikanan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Desa Inovasi dilakukan

secara partisipatif antar Satuan Kerja lingkup BRSDMKP, eselon I lingkup KKP, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat dengan harapan teknologi-teknologi hasil riset BRSDMKP tepat guna sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, serta petambak garam. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 6 Desa Inovasi sedangkan untuk realisasinya adalah tahunan.

Sasaran yang diharapkan dari program Desa Inovasi riset dan SDM kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya Iptek untuk kebutuhan masyarakat (desa)
2. Termanfaatkannya Iptek untuk meningkatkan produktifitas masyarakat (desa)
3. Terjalannya interaksi antara dunia Iptek (R&D) dengan dunia usaha/bisnis di masyarakat (desa)
4. Terwujudnya produk unggulan spesifik desa (daerah) yang berkualitas

Keluaran yang diharapkan dari program Desa Inovasi riset dan SDM kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut;

1. Terdiseminasikannya teknologi dan atau kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset BRSDMKP kepada *stakeholder* di desa.
2. Memberikan masukan penetapan kebijakan riset dan SDM dari umpan balik stakeholders sehingga dihasilkan teknologi dan atau kebijakan yang bersifat inovatif dan tepat guna.
3. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat KP

Pada IKU ini Capaian Keluaran Desa Inovasi/Desa Mitra pada triwulan I tahun 2023 belum ada capaiannya , sama seperti pada triwulan I tahun

2022, disebabkan masih adanya proses verifikasi proposal dari Daerah kab/kota yang membutuhkan waktu lama.

Sasaran Program SK.06 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKS.06.02 Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan

IKU ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan dan perikanan tepat guna. Penghitungan dilakukan mengidentifikasi jumlah percontohan penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pada triwulan IV tahun sudah selesai kegiatan lokasi unit percontohan penyuluhan KP dan untuk progress capaiannya mencapai 100%. Berikut adalah sebaran Lokasi percontohan penyuluhan dan komoditasnya di 9 Balai/Satminkal untuk 2023.

Target pada IKU ini sebesar 22 unit percontohan pada tahun 2023. Pada IKU ini dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, Capaian pada tahun 2022 dan Capaian Tahun 2023 pada Triwulan I masih 0.

Faktor Keberhasilan kegiatan ini : kegiatan tersebut sudah di implementasikan oleh Pusat Riset Kelautan dan Pusat Riset Perikanan sehingga tinggal mengimplementasikan kegiatan lapangannya kepada kelompok penyuluhan KP.

Sasaran Program SK.07

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.07.01

Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BRSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif.

Untuk Tahun 2023 IKU ini ada dilokasi BPPP Ambon , BPPP Banyuwangi dan BPPP Tegal, BPPP Medan dan BDA Sukamandi. Saat ini masih proses pekerjaannya oleh pihak ketiga.

Penyebab Keberhasilan IKU ini dikarenakan:

- 1) Proses Pengadaan Barang dan Jasa di laksanakan awal tahun jadi Bulan Februari 2022 sudah bisa Penandatanganan Kontrak
- 2) Pekerjaan PraSarana dan Sarana Di BPPP Ambon sudah mendekati Pekerjaan Fisik 100%
- 3) Pelaksanaan Pekerjaan hampir semua melalui Metode Penunjukan Langsung dengan Pagu di bawah 100juta

Sasaran Program SK.07

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKS.07.02

Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BRSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif.

Untuk Tahun 2023 IKU ini ada dilokasi BPPP Ambon , BPPP Banyuwangi, BPPP Medan, BPPP Bitung, BDA Sukamandi dan BPPP Tegal.Saat ini masih proses pekerjaanya oleh pihak ketiga.

Penyebab Keberhasilan IKU ini dikarenakan:

- 1) Proses Pengadaan Barang dan Jasa di laksanakan awal tahun jadi Bulan Februari 2023 sudah bisa Penandatangan Kontrak
- 2) Pekerjaan PraSarana dan Sarana Di BPPP Ambon sudah mendekati Pekerjaan Fiisk 100%
- 3) Pelaksanaan Pekerjaan hamper semua melalui Metode Penunjukan Langsung dengan Pagu di bawah 100juta

Sasaran Program SK.08 Aparatur Yang Dididik dan Dilatih

Indikator Kinerja IKS.08.01 Aparatur KP yang dilatih (orang)

IKU untuk Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi, maupun oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan memiliki peran strategis dalam pencapaian IKU tersebut. Peningkatan kompetensi ASN KP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pada tahun 2023 ini ditargetkan sebanyak 4.752 ASN KP mengikuti pelatihan, baik pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan maupun pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, seperti Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis/manajerial.

Realisasi jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP pada tahun 2023 ini adalah masih kosong.

Capaian positif IKU ini antara lain disebabkan oleh:

1. Pelatihan melalui aplikasi aplikasi e-milea sehingga bisa online ke semua ASn KKP
2. Eselon I Teknis pada awal tahun sudah berkoordinasi dengan BDA Sukamandi mengenai Diklat Teknis yang akan dilaksanakan
3. Tersedianya sarana pokok dan penunjang penyelenggaraan diklat,
4. Widyaiswara yang telah memiliki sertifikat ToT sesuai bidang diklat yang dilatihkan, dan tersedianya perangkat kurikulum dan modul pelatihan, serta telah terakreditasinya program diklat kepemimpinan tingkat III dan IV, serta diklat prajabatan di BDA Sukamandi oleh LAN-RI.

Capaian Perbandingan Triwulan I tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 adalah berbeda jauh capaiannya yaitu pada Triwulan I tahun 2022 285 orang sedangkan pada triwulan I tahun 2023 metode pengukurannya Semesteran.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.01

Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah jejaring dan atau kerjasama yang diinisiasi oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan maupun UPT Pelatihan dan Penyuluhan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati terkait kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati dalam bentuk Kepmen, SK, MOU, dan atau KAK yang sudah ditandatangani.

IKU dari sasaran strategis terselenggaranya kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan ini menggambarkan inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Puslatluh KP yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan, dan sebagai upaya lanjutan dari output yang telah dihasilkan untuk menjadi input pada proses selanjutnya.

Pada triwulan I tahun 2023 ini capaian untuk jumlah jejaring dan/atau kerjasama Puslatluh KP sudah ada capaian 2 MOU pada Triwulan I dari Target triwulan I tahun 2023 sebesar 2 MOU.

Sasaran Program SK.09

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.09.02

Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru. Definisinya adalah Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Formula indikator kinerja ini A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. Presentase dokumen layanan manajemen yang tersedia / dibandingkan total dokumen layanan manajemen yang ditargetkan. Bukti capaian diperoleh Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker.

Pada tahun 2023 Indikator kinerja ini sudah ada capaian sebesar 27,96% dari target Triwulan sebesar 25%.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.03

Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan

Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Kegiatan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap Tahunnya dilaksanakan dan untuk Tahun 2023 satker BPPP Ambon sebagai satker yang akan dinilai.

IKU yang di tetapkan pada PK Tahun 2023 menggunakan metode pengukuran tahunan, perbandingan dengan tahun sebelumnya juga sama untuk capaiannya masih nol.

Sasaran Program SK.09

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.04

Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan

Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Kegiatan dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap Tahunnya dilaksanakan dan untuk Tahun 2022 satker BPPP Bitung dan BPPP Ambon sebagai satker yang akan dinilai. IKU yang ditetapkan pada PK Tahun 2023 menggunakan metode pengukuran Tahunan, perbandingan dengan tahun sebelumnya juga sama untuk capaiannya masih nol.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.05

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP

IKU ini Nilai rekonsiliasi kinerja Puslatluh KP merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

IKU Ini di tetapkan pada PK Tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan IKU Tahun sebelumnya dengan realisasinya masih nol dan untuk capaiannya baru bisa dilihat pada Triwulan IV Tahun 2023.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.06

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP

Indikator Kinerja Utama ini Persentase unit kerja Puslatluh KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar belum mencapai target 92% capaian yang dicapai hanya mendapatkan 100% untuk Puslatluh KP dan dari target Triwulan I tahun 2023, Hasil penilaian nilai manajemen pengetahuan secara rinci per komponen pengukuran adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Manajemen Pengetahuan Triwulan Tahun 2023

PENGHITUNGAN PENERAPAN MP TW I PUSLATLUH 2022

DOKUMEN			
Dokumen	Capaian	Target	%
Perjanjian Kinerja (Level 1)	1	1	100,00%
Manual IKU (Level 2)	1	1	100,00%
Rencana Aksi	1	1	100,00%
Laporan Kinerja	1	1	100,00%
			100,00%

KEAKTIFAN			
Level	Capaian (Aktif)	Target (Aktif)	%
Level 2	3	3	100,00%
Level 3	24	24	100,00%
Level 4	48	48	100,00%
	Rata-rata		100,00%

PENILAIAN			
Komponen	Nilai	Bobot	%
Dokumen	100,00%	20%	20,00%
Keaktifan	100,00%	80%	80,00%
	Presentase Capaian TW I		100,00%

Perbandingan dengan IKU tahun sebelumnya yaitu untuk triwulan I yaitu sebesar 100%.Permasalahan pada IKU ini disebabkan sebagai berikut:

1. Adanya kekosongan jabatan pada eselon III sehingga harus membuat akun baru pengganti jabatan sementara (Plt) pada aplikasi bitrix24kkp
2. Ada Revisi PK Puslatluh dan UPT
3. Input data ke dalam aplikasi bitrix24 kkp harus memuat unsur 5W1H

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.07 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)

IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP terdiri dari indeks kualifikasi Pendidikan ASN, indeks kompetensi ASN, indeks kinerja ASN, dan indeks disiplin ASN.

Capaian IKU ini belum dilakukan pengukuran oleh Eselon I KKP pada triwulan I tahun 2023. Capaian IKU ini baru dilakukan pengukuran sekitar bulan November atau pada triwulan I tahun 2023.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.08

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2021

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari pada itu, penting untuk menjaga pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen. Pada tahun 2023, dari target IKU sebesar <1%, untuk capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP belum ada.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.09

**Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja
lingkup Puslatluh KP**

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen. Pada tahun 2023, dari target IKU sebesar 75%, untuk capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP 75%.

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.10

**Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan
Inovasi Pelayanan Publik**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah

ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment). PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results).

Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah d.h.i KKP dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup BRSDMKP Tahun 2023 tersebut bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB Tahun 2023 lingkup BRSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB BRSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 26 Tahun 2020, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB KKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup KKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan

nilai PMPRB sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker terkait, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB. Dalam rangka PMPRB tersebut, Inspektorat Jenderal KKP perlu menilai kesesuaian pemenuhan dokumen dengan matriks penilaian mandiri (self assessment).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup KKP Tahun 2023 bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB TA 2023 lingkup BRSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB BRSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 30 Tahun 2018, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB BRSDMKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup BRSDMKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan nilai PMPRB sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker lingkup BRSDMKP, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB.

IKU ini adalah IKU Baru pada tahun 2023 yaitu BPPP Ambon yang pengukurannya Tahunan, adapun capaian pada IKU ini sesuai manual IKU nya diambil dari Penilaian LHE PMPRB .

Sasaran Program SK.09 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKS.09.11 Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)

IKU ini adalah IKU Baru pada tahun 2023, dan pengukuran capainnya menggunakan Tahunan.

Sebagaimana kita ketahui Bersama, berdasarkan Peraturan Menteri KP No. 68 Tahun 2017 tentang SAKIP (saat ini Permen KP dimaksud dalam proses reviu), tujuan pelaksanaan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan disertai alat bukti. SAKIP membantu kita untuk memberikan pedoman proses/tahapan pencapaian tujuan organisasi yang valid, measurement, dan akuntable, serta memberikan informasi kepada kita posisi pencapaian kinerja yang telah dihasilkan. (apakah berhasil ataukah gagal).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, salah satu pengendalian dan fasilitasi dalam pengelolaan kinerja dalam adalah dalam bentuk Advisory Services (pendampingan dalam rangka perbaikan kinerja). Salah satu bentuk implemementasi di BRSDM berupa inisiasi metode pendampingan evaluasi SAKIP mandiri dan rekon kinerja pada seluruh satker secara berjenjang yang dilakukan BRSDM, mulai diadopsi untuk lingkup KKP. Begitupula evaluasi berbasis aplikasi menjadi nilai inovasi bagi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP, menjadikan BRSDM mendapatkan nilai lebih dalam pengelolaan kinerja.

Sebagai informasi nilai SAKIP BRSDM KP Tahun 2022 adalah 81,22 dari target nilai 80,01 (mendapatkan peringkat ke-2 lingkup KKP setelah PSDKP). Tentunya pencapaian ini atas hasil kerja bersama seluruh unit kerja BRSDM yang saling bersinergis memberikan dukungan atas pencapaian akuntabilitas kinerja.

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan Anggaran Lingkup Puslatluh KP Sampai dengan tahun 2023, Puslatluh KP melaksanakan DIPA TA. 2023 dengan total anggaran Lingkup Puslatluh KP sebesar Rp.656.527.976.000,- dan Pagu Puslatluh KP sebesar Rp. 14.971.385.000,-. Adapun Realisasi sampai dengan 31 Maret 2023 tahun anggaran 2023 adalah realisasi anggaran pada DIPA Lingkup Puslatluh KP Rp. 123.021.612.542,- (18,74%) dan Realisasi Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 2.698.186.964 (18,02 %).

NO	UPT PUSLATLUH	JUMLAH		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%-ase
1	Puslatluh	14.971.385.000	2.698.186.964	18,02%
2	BDA Sukamandi	12.474.699.000	2.657.203.524	21,30%
3	BPPP MEDAN	76.302.752.000	14.349.610.442	18,81%
4	BPPP TEGAL	100.573.214.000	17.108.622.162	17,01%
5	BPPP BANYUWANGI	90.926.508.000	15.560.815.637	17,11%
6	BPPP BITUNG	56.947.073.000	10.754.147.815	18,88%
7	BPPP AMBON	59.317.215.000	9.708.277.859	16,37%
8	BRPPUPP Palembang	65.032.197.000	13.875.861.105	21,34%
9	BRPBATPP Bogor	33.891.141.000	6.325.426.912	18,66%
10	BBRBLPP Gondol	59.538.217.000	11.776.494.465	19,78%
11	BRPBAPPP Maros	86.553.575.000	18.206.965.657	21,04%
	TOTAL	656.527.976.000	123.021.612.542	18,74%

Sementara jika dilihat dari anggaran berdasarkan pagu di Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, dimana kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP KP merupakan gabungan dari kinerja satuan pelatihan dan penyuluhan KP, maka pagu dan realisasi juga merupakan gabungan dari seluruh satuan pelatihan dan penyuluhan KP. Tabel berikut menggambarkan realisasi per sasaran strategis bidang pelatihan dan penyuluhan KP Tahun 2023: Secara umum kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2023 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

- a) Disiplin dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran/rencana operasional kegiatan yang sudah disusun;
- b) Anggaran yang masih bergerak dinamis dimana prioritas pelaksanaan kegiatan masih terfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemik Covid 19 yang masih berlangsung di tahun 2023 ini;
- c) Untuk penghematan anggaran, memantau dan memastikan bahwa target yang sudah ditetapkan dalam renja tetap sejalan

4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA PUSLATLUH KP

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran

dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada Puslatluh KP yaitu;

1. Perencanaan

Efisiensi anggaran dilakukan PuslatluhKP dalam beberapa dimensi, yaitu:

Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya.

Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2022 Puslatluh KP telah menetapkan kegiatan prioritas, yang pengawalannya dilakukan secara rutin (*weekly report*) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai.

Dimensi efisiensi ketiga berupa penyederhanaan nomenklatur lingkup organisasi. Puslatluh KP merupakan gabungan 2 (dua) eselon II yang tentunya berdampak pada penyederhanaan nomenklatur, penguatan tugas dan fungsi, serta berpengaruh nyata pada pemangkasan jumlah kegiatan dengan tujuan penghematan atas uang yang banyak beredar mengikuti jumlah dan fungsi.

Dimensi efisiensi keempat berupa refofusing anggaran pada pemangkasan alokasi anggaran belanja modal, perjalanan dinas dan pertemuan. dialihkan kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Dukungan Puslatluh KP dalam pencapaian upaya dimaksud dengan melakukan reuiu penganggaran secara berjenjang yang melibatkan *stakeholder* meliputi reuiu anggaran tingkat Puslatluh KP, reuiu anggaran tingkat KKP (Itjen dan Setjen), dan reuiu K/L (DJA dan Bappenas).

2. Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan serapan anggaran terutama untuk perjalanan dinas

- Sinergitas pelaksanaan kegiatan antar satker dan pusat dalam satu rangkaian
- Mengutamakan pertemuan di ruang rapat internal atau satker-satker Puslatluh KP
- Sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui *video conference* dan *live streaming*
- Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan atasan berbasis *Balance Score Card* dan SKP.
- Membayarkan biaya operasional Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai kinerja yang dilaporkan dan sepengetahuan Kepala Dinas KP sebagai pengguna.
- Mengadakan Pelatihan masyarakat dan aparatur dengan via Daring/online sehingga menghemat anggaran.

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran agar tepat penggunaan dan sesuai aturan perundang-undangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev Bappenas, E-Dalwas KKP, Kinerjaku KKP, Simlat, e-pelaporan, serta Dashboard dan *Weekly Report* BRSDM
- Melaksanakan evaluasi dan pembahasan teknis dan manajerial program dan kegiatan Puslatluh Kp dengan virtual. Hal tersebut memangkas

perjalanan dinas dan pertemuan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang signifikan

- Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.

Permasalahan

1. Banyak Realisasi Data Capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan sedangkan realisasi keuangannya tidak sampai 100%, sehingga menjadi analisa bahwa kegiatan tersebut tidak membutuhkan biaya yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan anggaran sebagian satker masih belum **tertib administrasi**.

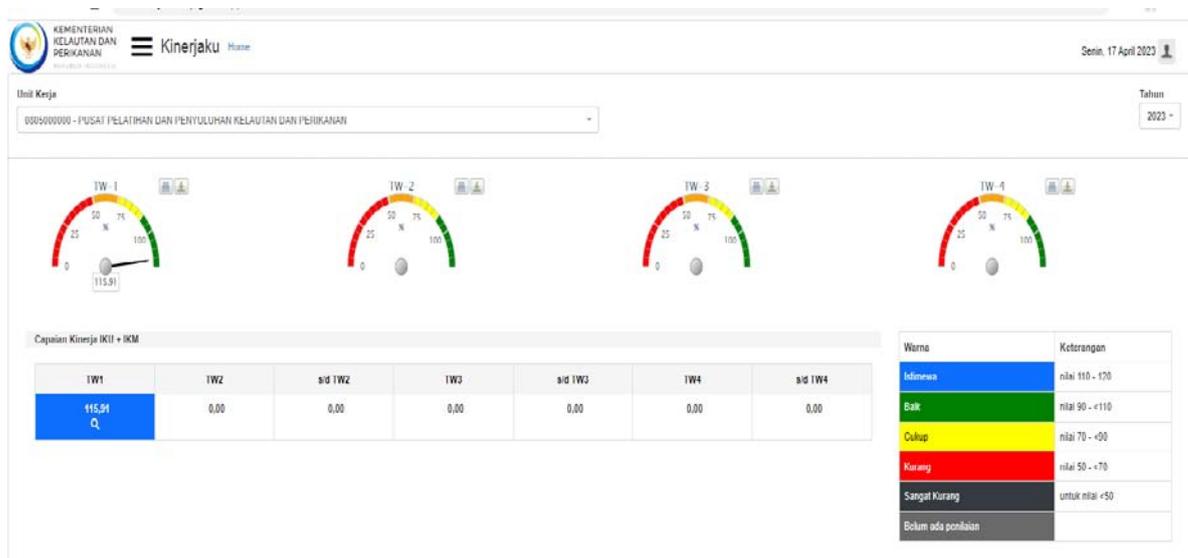
Rekomendasi :

- a. Menyiapkan kapasitas SDM pengelola keuangan untuk merespon berbagai perkembangan IT dalam pengelolaan keuangan dan perubahan peraturan dalam mekanisme pencairan APBN yang dinamis;
- b. Melaksanakan pengawalan kepatuhan dalam pengelolaan UP/TUP, dan meningkatkan efisiensi penggunaan belanja operasional seperti perjalanan dinas, dan rapat-rapat di luar kantor

BAB IV PENUTUP

1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Puslatluh KP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Puslatluh KP pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 115,91% seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN			
		Target	Target Tw 1	Capaian	%
1. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan					
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) (Tahunan)	70		-	
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	31.490	4.560	5.667	124,28
3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768	1,04	1,38	132,31
2. Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan					
4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1800	147	244	165,99
3. Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP					
5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang) (Tahunan)	137		-	
6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket) (Tahunan)	10		-	
4. Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP					
7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	6		-	
8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7		-	
5. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000	7.612	8.855	116,33
10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800	-	15	
11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.000	584	671	114,90
12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang) (Tahunan)	12.342		-	
6. Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP					
13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan lptek (Desa) (Tahunan)	6			
14	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (produk) (Tahunan)	22			
7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN			
		Target	Target Tw 1	Capaian	%
15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) (Tahunan)	6			
16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit) (Tahunan)	4			
8. Aparatur Yang Dididik dan Dilatih					
17	Aparatur KP yang dilatih (orang)	4.770	1.770	2.415	136,44
9. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker					
18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Buah)	10	2	2	100,00
19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	25	27,96	111,84
20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1			
21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1			
22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92			
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP (%)	92	100	109	108,70
24	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)	77			
25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2021 (%)	≤0,5			
26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)	75	75,00	100	133,33
27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Inovasi)	1			
28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP	80			

2. Permasalahan dan Rekomendasi

Meskipun secara umum kinerja untuk tahun 2023 ini Puslatluh KP telah mampu merealisasikan target kinerjanya, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dengan rekomendasi sebagai alternatif solusi demi tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan sampai dengan Triwulan I tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu Masih adanya Capaian IKU yang belum bisa di realisasikan.

Upaya-upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan capaian kinerja Puslatluh pada Triwulan mendatang, yaitu:

1. Mempertahankan dan meningkatkan capaian positif yang telah diperoleh;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi prioritas Lembaga; serta
3. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.lkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radlarta**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia


I Nyoman Radlarta

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	31.490
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	9,768
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.800
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	137
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	10
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK)	9
		8	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
5	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	47.000
		10	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	1.800
		11	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3.000
		12	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342
6	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	13	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)	6
		14	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	22

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	6
		16	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	4
8	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	17	Aparatur KP yang dilatih (Kelompok)	4.770
9	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (Buah)	10
		19	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100
		20	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		21	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		22	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	92
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Puslatluh KP (%)	92
		24	Indeks Profesionalitas ASN Puslatluh KP (indeks)	77
		25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		26	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja Puslatluh KP (%)	75
		27	Unit Kerja Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		28	Nilai PM SAKIP Puslatluh KP (Nilai)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 128.466.010.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 3.000.000.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM	Rp 525.061.966.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		Rp 656.527.976.000

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia

I Nyoman Radiarta

Jakarta, 9 Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

Lilly Aprilia Pregiwati